EFEKTIVITAS PENERIMAAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB P3) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) PRABUMULIH

SKRIPSI

MARTINI YULIANTI

01031181520029

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB P3) DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) PRABUMULIH

Disusun Oleh :

Nama	: Martini Yulianti
NIM	: 01031181520029
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
	Ketua
Tanggal : 23 Juli 2020	Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA
	NIP 19660820 199402 2 001
	Anggota
Tanggal : 23 Juli 2020	Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA
	NIP 19860513 201504 2 002

i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (PBB P3) DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) PRABUMULIH

Disusun oleh:

Nama	: Martini Yulianti
NIM	: 01031181520029
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Inderalaya, 16 September 2021

Ketua	Anggota	Anggota
Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA	Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA	Anton Indra Budiman, S.E., M.Si,Ak
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19860513 201504 2 002	NIP. 19771016 201504 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
23/11 2021

Arista Hakiki, S.E., M.Acc.,Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Martini Yulianti
NIM	: 01031181520029
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih".

Pembimbing:

Ketua	: Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA
Anggota	: Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA.

Tanggal Ujian : 23 Desember 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 23 Desember 2020
Pembuat Pernyataan

Martini Yulianti
NIM. 01031181520029

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat burutk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.". **(QS. Al - Baqarah: 216)**

"Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". **(QS. Yusuf : 87)**

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya". **(QS. Al - Baqarah : 286)**

*"*karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahab. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*"*. **(QS. Al – Insyirah : 5 - 6)**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

- Allah SWT
- Diriku
- Ibuku dan Ayahku
- Keluargaku
- Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun pembaca agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna untuk ke depannya.

Indralaya, 23 Desember 2020
Penulis,

Martini Yulianti
NIM 01031181520029

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha pengasih dan penyayang, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat serta memberi kemudahan serta kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi panutan bagi seluruh umat manusia.
3. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE beserta jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E.
5. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA dan Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA dan Ibu Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran serta pengarahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji seminar proposal skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan masukan serta pengarahan kepada penulis.
8. Bapak Anton Indra Budiman., S.E., M.Si selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Akuntansi, bagian tata usaha dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan penulis.
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih dan Direktorat Jendral Pajak Kanwil Sumbagsel, terutama Kak Indi, Kak Husni dan Mba Adel yang bersedia membantu selama pengambilan data.
12. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Madsari dan Ibu Enah terima kasih yang tak terhingga atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, nasihat, motivasi, perhatian dan pengorbanan. Terima kasih atas semuanya yang telah membawaku hingga sampai pada tahap ini. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan.
13. Keluarga besarku terutama aak dan teteh terima kasih telah memberikan motivasi, saran dan solusi untuk semua masalah yang kuhadapi dalam kehidupan ini.

14. Sahabat-sahabatku Alpaha C. Chabe (celik, henny, andik) yang selalu memberi dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan yang indah selama penulis menempuh pendidikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan do'a sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Indralaya, 23 Desember 2020

Martini Yulianti
NIM. 01031181520029

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Martini Yulianti
NIM : 01031181520029
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 16 September 2021

Ketua	Anggota
Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA	Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih

Oleh :

Martini Yulianti

Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA

Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Prabumulih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu berfluktuatif

Kata kunci : ***Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.***

Ketua	Anggota
Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA	Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

x

ABSTRACT

The Effectiveness of Land and Building Tax Revenues from the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB P3) at the Prabumulih Primary Tax Service Office (KPP)

By :

Martini Yulianti

Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA

Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA

This study aims to determine the collection procedure and the level of effectiveness of land and building tax revenues in the plantation, forestry and mining sectors at Prabumulih Primary Tax Service Office. Data collection techniques were carried out by means of documentation and interviews. The results of data collection were then analyzed using the comparative descriptive analysis method. The results showed that the effectiveness of land and building tax revenues for the plantation, forestry and mining sectors from 2015 to 2019 always fluctuated.

Keywords: Effectiveness, Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector.

chairman	*Member*
Hj. Ermadiani, SE, M.M, Ak, CA	Meita Rahmawati, S.E, M.Acc, Ak, CA
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19860513 201504 2 002

Acknowledged by,

Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Martini Yulianti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 14 Juli 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jl. Pasundan Komp. Yuka I Blok F No 2 Kalidoni Palembang
Email	: martiniyulianti@gmail.com
No. Handphone	: 081273081574

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009	: SD Negeri 254 Palembang
Tahun 2009-2012	: SMP Negeri 29 Palembang
Tahun 2012-2015	: SMA Negeri 05 Palembang
Tahun 2015-2021	: S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

xii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF……i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK..... viii

ABSTRAK x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xii

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah: 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 9

1. Manfaat Teoritis..... 9

2. Manfaat Praktis..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak) 11

2.2. Efektivitas..... 12

2.3. Pajak **12**

2.4. Pajak Bumi dan Bangunan **13**

2.4.1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 13

2.4.2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan 14

2.4.3. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 15

2.5. Penelitian Terdahulu **19**

2.6. Kerangka Teoritis **23**

BAB III METODE PENELITIAN **25**

3.1. Ruang Lingkup Penelitian **25**

3.2. Rancangan Penelitian **25**

3.3. Jenis dan Sumber Data **26**

3.4. Teknik Pengumpulan Data **26**

3.5. Teknik Analisis Data **26**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **29**

4.1. Penyajian Data **29**

4.1.1. Sejarah, Visi dan Misi KPP Prabumulih 29

4.1.2. Stuktur Organisasi 34

4.1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 36

4.2. Analisa Data **41**

4.2.1. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih. 41

4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih. 50

4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak KPP Prabumulih. 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 68

5.1. Kesimpulan 68

5.2. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi PBB Sektor Perkebunan 6

Tabel 1.2. Target dan Realisasi PBB Sektor Perhutanan 6

Tabel 1.3. Target dan Realisasi PBB Sektor Pertambangan 7

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 19

Tabel 3.1. Klasifikasi Tingkat Efektivitas..... 28

Tabel 4.1.Penerimaan PBB Sektor Perkebunan 36

Tabel 4.2. Penerimaan PBB Sektor Perhutanan..... 38

Tabel 4.3. Penerimaan PBB Sektor Pertambangan 40

Tabel 4.4. Efektivitas Penerimaan PBB Sektor Perkebunan..... 51

Tabel 4.5. Efektivitas Penerimaan PBB Sektor Perhutanan 54

Tabel 4.6. Efektivitas Penerimaan PBB Sektor Pertambangan..... 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis 24

Gambar 4.1. Stuktur Organisasi KPP Prabumulih 35

Gambar 4.2. Pendaftaran dan Pemutakhiran Data 42

Gambar 4.3. Pengembalian SPOP 44

Gambar 4.4. Surat Teguran 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah:

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perubahan sosial yang sangat cepat terutama pada sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan di Indonesia dibiayai dari berbagai sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) ialah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, dimana hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk kepentingan nasional seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan sebagainya. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (www.pajak.go.id).

Salah satu provinsi yang termasuk kategori baik sebagai penyumbang pertumbuhan penerimaan pajak adalah Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh kepala kantor wilayah DJP Sumsel-Babel, yang dimuat dalam berita rmolsumsel.com yang ditulis Solehin (2018) bahwa penerimaan pajak di Sumatera Selatan diyakini baik sampai dengan September 2018 sudah mencapai 67,38% atau Rp 16,04 triliun, dimana pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sebesar 22,09% dari periode yang sama tahun lalu dan lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 14,06%. Penerimaan pajak terdiri dari PPh non migas sebesar Rp 5,38 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,53 triliun, PBB sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan sebesar Rp 1,08 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 1,83 triliun.

Meskipun Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi penyumbang pajak yang baik, penerimaan pajak di Sumsel setiap tahunnya cenderung fluktuatif terutama PBB sektor perkebunan, dimana perolehan pajak atas perkebunan tidak dipengaruhi harga jual (Sutiawan,2018). Kondisi demikian disebabakan adanya jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah dibagi berdasarkan kewenangan Ditjen Pajak Daerah dan Pusat. Sehingga jenis pajak yang dipungut oleh pusat cenderung berpengaruh pada harga jual dipasar. Walaupun demikian, secara keseluruhan

perolehan Provinsi Sumsel lebih baik dari tahun lalu terutama PBB sektor Perkebunan, yakni sedikit mendekati target yaitu Rp 140 Miliar atau mengalami pencapaian 75,77% dengan pertumbuhan 31,27%, sedangkan kehutanan mengalami penurunan 0,46%.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. PBB terdiri dari 5 sektor yaitu Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh Pusat (negara), namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sehingga terhitung 1 Januari 2014 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) dialihkan pengelolaannya menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sementara Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) masih dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak Kemenentrian Keuangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

nomor 12 Tahun 1994 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dimana pengelolaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat (negara). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pemanfaatan PBB khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan digunakan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan, (Rahmawati, Juniar dan Ali Wardhana, 2017). Meskipun penerimaan PBB tidak begitu besar terutama PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, namun menjadi salah satu pajak yang potensil dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Salah satu daerah yang potensil dan berkontribusi terhadap penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan ialah Prabumulih.

Sejak 9 September 2008, Kota prabumulih telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dimana dengan berdirinya kantor tersebut kota prabumulih telah dapat mengelola sendiri pajak yang ada di daerah tersebut terutama penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Kabupaten Prabumulih adalah salah satu satu dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 434,46 km^2. Keadaan luas hutan sebesar 2.213 hektar, luas tanaman perkebunan sebesar 20.076 hektar yang terdiri dari tanaman karet, kelapa, kelapa sawit dan tanaman lainnya, luas tanah holtikultura

sebesar 471 hektar, serta persentase lifting minyak dan gas bumi sebesar 58% (BPS Kota Prabumulih, 2016). Besarnya luas wilayah Kabupaten/Kota Prabumulih dengan keadaan tanah yang digunakan khususnya untuk perkebunan, perhutanan, maupun pertambangan minyak, gas dan batubara. Terlebih lagi hampir 50% wilayah Kabupaten/Kota Prabumulih terdiri mineral batubara yang membuat Prabumulih merupakan kota yang bergantung dengan tambang, dan memiliki potensi penerimaan pajak terbesar terutama di sektor pertambangan (Jamil,2017). Selain itu hasil perkebunan yang melimpah terutama perkebunan karet, sawit, dan nanas juga menjadikan Prabumulih sebagai salah satu Kabupaten/Kota penerimaan pajak yang baik.

Penerimaan PBB dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun tidak begitu besar. Penulis bermaksud menganalisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kabupaten/Kota Prabumulih, karena kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Prabumulih yang berlimpah merupakan hal yang menarik untuk diteliti, hal ini penting karena dengan melimpahnya kekayaan alam di Kabupaten/Kota Prabumulih belum tentu tingkat penerimaan pajaknya efektif. Besar kecilnya tingkat efektivitas PBB ditentukan dari besarnya target dan realisasi yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih seperti terlihat di dalam tabel.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi PBB Perkebunan

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp 9.708.524.000	Rp 12.862.839.061
2016	Rp 10.099.265.000	Rp 11.429.687.539
2017	Rp 6.000.235.000	Rp 14.011.046.429
2018	Rp 13.079.257.000	Rp 9.340.353.462
2019	Rp 14.743.496.000	Rp 3.569.399.554

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB sektor perkebunan di Kabupaten Prabumulih dari tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penerimaan pajak dari sektor perkebunan ini selalu mengalami peningkatan, terlihat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 dimana realisasi penerimaan pajaknya mencapai angka Rp. 14.011.046.429. Namun, pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sektor perkebunan mengalami penurunan dari target yang ditentukan sebesar Rp. 13.079.257.000 untuk tahun 2018 dan Rp. 14.743.496.000 pada tahun 2019. Sedangkan realisasi penerimaan pajaknya hanya sebesar Rp. 9.340.353.462 pada tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 3.569.399.554.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi PBB Perhutanan

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp 4.077.284.000	Rp 27.937.253.330
2016	Rp 6.211.433.000	Rp 6.211.906.107
2017	Rp 3.048.363.000	Rp 6.672.325.937
2018	Rp 6.672.326.000	Rp 2.633.071.299
2019	Rp 9.830.251.000	Rp 5.625.871.662

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019

Pada tabel 1.2. realisasi penerimaan pajak sektor perhutanan yang tertinggi ialah pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 27.937.253.330 dari taget yang ditentukan hanya Rp. 4.007.284.000. Pada tahun 2016, realisasi

penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun 2016 ini hanya sebesar Rp.6.211.906.107. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 450.419.830. Tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sektor Perhutanan mengalami penurunan kembali sehingga tidak terpenuhinya target yang ditentukan. Pada tahun 2019, realisai target penerimaan pajak sebesar Rp. 9830.251.000 yang lebih besar targetnya dari tahun sebelumnya dan juga realisasi penerimaan pajaknya lebih besar yaitu sebesar Rp. 5.625.871.662.

Tabel 1.3. Target dan Realisasi PBB Pertambangan

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp 323.769.685.000	Rp 539.361.457.461
2016	Rp 364.850.212.000	Rp 583.388.414.106
2017	Rp 618.389.510.000	Rp 680.101.092.820
2018	Rp 673.646.458.000	Rp 549.637.940.944
2019	Rp 629.595.429.000	Rp 669.891.542.552

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, 2019

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB sektor pertambangan selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dan 2016, penerimaan pajak pada sektor pertambangan mengalami peningkatan dari target yang ditentukan. Namun, pada tahun 2018, target penerimaaan pajak pada tahun ini tidak mencapai target yang telah ditentukan, dimana target pada tahun ini sebesar Rp. 673.646.458.000 sedangkan realisasi penerimaanya hanya sebesar Rp. 549.637.940.944. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp. 669.891.542.552 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 629.595.429.000.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan**

Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih?.
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih?.
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih.

2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Pratama (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih.
3. Upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Prabumulih Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referesi tambahan dan masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Serta untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan, tingkat efektivitas dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman tentang fenomena perpajakan yang terjadi, terutama tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangn (PBB P3). Manfaat untuk pembaca diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan terkait dengan penelitian, serta dengan

adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, Rima. 2013. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol 1, No 2.p

Badan Pusat Statistik. 2016. Prabumulih dalam Angka. BPS. Kabupaten Prabumulih. Prabumulih.

Beni, Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Taushia, Jakarta Pusat.

Handoko, T.Hanny 2014. Manajemen. Edisi ke-2. Yogyakarta BPFE.

Jamil, Fikri. 2017. Kota Prabumulih "Keukeh" Tolak Tambang BatuBara. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/fikrijamil/5911580802b0bdb12a04bc96/kota-prabumulih-keukeuh-tolak-tambang-batubara, diakses pada tanggal 1April 2019.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Prabumulih Tahun 2014- 2018.

Kharisma Wanta Tarigan. 2013. Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN 2303-1174.

Kobandaha, dan Heince R. N. Wokas. 2016. Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobugu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.

Lam, Novita dan Harijanto Sabijono. 2015. Analisis Efektivitas Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA. Vol 3, No 2 (2015). http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8575/8148 Diakses 19 Juni 2019. Hal. 375-499.

Lubis, Putri Kemala Dewi. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Nagaro, Mukhamad Wisnu.2018. Menengok Sejaran Perpajakan di Indonesia : Bagian Pertama https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama/ diakses pada tanggal 1April 2019.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 45/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi.

Peraturan Jendral Pajak Nomor P – 02/PJ/2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutrang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya

Peraturan Jendral Pajak Nomor PER 47/ PJ/ 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Pajak.

Pudyatmono,Sri Y. Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

Purwasih, Tyas Sri. 2014. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.

Rahmawati, Juniar dan Ali Wardhana. 2017. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. Universitas Lambung Mangkurat.

Sari, Yulia Anggara. 2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Sekaran, Uma. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian. Salemba Empat, Jakarta.

Surat Edaran Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ/2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Ekstentifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Kegiatan Pendukung Lainnya

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstentifikasi Wajib Pajk Dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-51/PJ.9/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstentifikasi Pajak Direktur Jendral Pajak

Sutiawan, Iwan. 2018. Pajak Perkebunan di Sumsel Cenderung Tak Dipengaruhi harga jual. Gatra. http://gatra.com/rubik/nasional/pemerintahan daerah/ 35382 Pajak perkebunan-di-Sumsel-Babel-cenderung-tak-dipengaruhi harga-jual, diakses pada tanggal 28 Desember 2018

Solehin, Raden Mohd. 2018. Penerimaan Pajak di Sumsel Babel Tahun Ini Diyakini Lebih Baik. Kantor Berita Rmol Sumsel. http://www.rmolsumsel.com/read/2018/10/19/102164/Penerimaan Pajak-di-Sumsel-Babel-Tahun-Ini-Optimis-Lebih-Baik-. Diakses pada tanggal 3 Januari 2019.

Ummah, Atik Choirul. 2012. Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota serang.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No 18 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang Perkebunan.

Undang-Undang No 41 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perhutanan.

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Universitas Jember. Jurnal STIE SEMARANG VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017(ISSN: 2085-5656).

www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat, diakses tanggal 3 Januari 2019.